

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Penyusunan Dokumen ini merupakan pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora tahun 2016-2021 yang mempunyai visi “ Terwujudnya masyarakat Blora yang lebih Sejahtera dan Bermartabat ”.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blora

Blora, April 2019

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLORA

Drs. SUGIYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198103 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
<i>A. Latar Belakang</i>	1
<i>B. Gambaran Umum Kabupaten Blora.....</i>	1
BAB II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	3
A. Visi dan Misi	3
B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum	4
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan	6
A. Sasaran Strategis	6
B. Rencana Tingkat Capaian (Target)	7
BAB IV Penutup	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya suatu Tata Pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Perencanaan pembangunan tahunan daerah harus disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres nomor 29 tahun 2014 Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah di daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan mempertanggung jawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Guna memenuhi kewajiban dimaksud maka Pemerintah Kabupaten Blora menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1(satu) tahun.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Blora

Pemerintah Kabupaten Blora yang dipimpin Bupati melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat (melalui perwakilan) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai *stakeholder* yang tercermin dalam RPJMD periode lima tahun dan dijabarkan dengan RKPD tiap tahun. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah 11 tahun 2016 tanggal 26 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang terdiri :

- 1) Sekretariat Daerah (3 Asisten, 9 Bagian)
- 2) Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah
- 3) Staf Ahli (3 Staf Ahli)

- 4) Inspektorat Daerah
 - 5) Badan Daerah, terdiri dari :
 - 5.1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 5.2) Badan Kepegawaian Daerah;
 - 5.3) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah
 - 6) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 6.1) Dinas Pendidikan;
 - 6.2) Dinas Kesehatan;
 - 6.3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 6.4) Dinas Lingkungan Hidup
 - 6.5) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 6.6) Dinas Kepemudaan Olahraga , Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 6.7) Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 - 6.8) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial;
 - 6.9) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 6.10) Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - 6.11) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - 6.12) Dinas Perumahan,Permukiman dan Perhubungan;
 - 6.13) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - 6.14) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6.15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 6.16) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;
 - 6.17) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 6.18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja
 - 8) Kecamatan (16)
- SKPD yang masih menunggu Peraturan Menteri yang lain yaitu :
- Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora;
 - Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu;
 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

A.1. Visi

Visi adalah rumusan keadaan masa depan yang dicapai dengan mendasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

**“Terwujudnya Masyarakat Blora yang
Lebih Sejahtera dan Bermartabat”**

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan

masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

A.2. Misi

Sesuai dengan visi Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor*), *pro job*, *pro growth*, *pro environment* dan *pro gender*.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

B. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

➤ Kebijakan RPJPD pada RPJMD ke-3 (Tahun 2015-2020)

RPJMD ketiga dalam Pemerintah Kabupaten Blora ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur yang makin berkualitas dan kondisivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sementara bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora yang merupakan OPD baru, tahun ketiga ini merupakan tahun yang tidak mudah karena merupakan masa transisi pemisahan-penggabungan menjadi OPD baru. Meski begitu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dengan berpedoman dari RKT Kabupaten Blora berkomitmen untuk berkontribusi dalam tercapainya beragam target yang dicanangkan dalam Renja Kabupaten Blora di tahun ke-3 ini.

Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Blora berdasarkan Perda Tersebut adalah Dinas Tipe B sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika menbidangi penyebarluasan informasi, pengembangan dan pemeberdayaan Teknologi Informasi Komunikasi merupakan aspek yang menjajikan fasilitas terhadap berbagai kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat, organisasi termasuk dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik.

Salah satu upaya guna mewujudkan peningkatan Persandian dan Statistik adalah dengan upaya peningkatan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik elektronik government (E-gov) yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintah dengan teknologi informasi.

Sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang pengelolaannya berbasis Elektronik Government (E-Government) sehingga cara-cara konvensional harus di tinggalkan.

Pengembangan Program Smart City atau kota pintar, untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Blora agar mengembangkan E-Government dalam pelayanan publik.

Beragam langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Blora, baik di tingkat regional maupun nasional. Dengan meningkatkan daya saing maka diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, derajat kesehatan serta prestasi olahraga mampu mencapai target yang diinginkan.

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Dinkominfo Tahun 2016-2021

Misi	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN dan Demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	➤ Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam perbaikan kualitas pelayanan statistik kearsipan dan persandian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan penyediaan data statistik daerah ➤ Peningkatan pengamanan informasi dengan sandi
	➤ Meningkatkan Kapasitas aparatur Perangkat Daerah dalam Pengelolaan jaringan dan pemanfaatan aplikasi E-Government lingkup Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana berbasis teknologi ➤ Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan telekomunikasi.

➤ **Tujuan dan Sasaran Kabupaten Blora Tahun 2019**

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN dan Demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik	➤ Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan pemerintah daerah	➤ Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK ➤ Meningkatnya kualitas pelayanan statistik dan persandian

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Berdasarkan arah kebijakan Nasional, Prioritas Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 isu strategis Kabupaten Blora, prioritas dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016 -2021 dan penelaahan pokok- pokok pikiran DPRD Kabupaten Blora maka Prioritas pembangunan daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 dirumuskan secara terperinci ke dalam sasaran dan fokus pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam pengelolaan jaringan dan pemanfaatan aplikasi E-Government antara lain :
 - a. Perangkat Daerah yang telah memiliki jaringan internet
 - b. Persentase Perangkat Daerah telah memiliki website
 - c. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi
2. Peningkatan kualitas pelayanan public melalui peningkatan sarana prasarana berbasis teknologi dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan telekomunikasi antara lain :
 - a. Jumlah menara telekomunikasi
 - b. Informasi kebijakan daerah
 - c. Keterbukaan Informasi publik
 - d. Fasilitasi Pembinaan PPID SKPD
3. Peningkatan desiminasi dan pendistribusian informasi antara lain :
 - a. Pelakasanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional
4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan statistik antara lain :
 - a. Presentase keterisisan data SIPD
 - b. Ketersediaan dokumen IKK
5. Peningkatan kualitas pelayanan persandian antara lain :
 - a. Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait

B. Rencana Tingkat Capaian (Target)

RENCANA KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUNAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis TIK			
1. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Jaringan dan Pemanfaatan Aplikasi E-Goverenment	Perangkat Daerah yang telah memiliki jaringan internet	PD	46
	Persentase Perangkat Daerah telah memiliki website	%	100
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi	%	33
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Sarana Prasarana Berbasis Teknologi dan Kesadaran Masyarakat Dalam Pemanfaatan Telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi	Unit	146
	Informasi kebijakan daerah	%	100
	Keterbukaan komunikasi publik	%	100
	Fasilitasi pembinaan PPID SKPD	%	46
3. Terwujudnya Peningkatan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi	Pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi nasional	Media Massa	14
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Statistik dan Persandian			
1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Statistik	Persentase Keterisian data SIPD	%	85
	Ketersediaan dokumen IKK	Dok	1
2. Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan Persandian	Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 MERUPAKAN KOMITMEN kami dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Dengan tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata kepada pihak-pihak yang berpartisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Blora untuk bersama mencapai cita-cita “ **Terwujudnya masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat** ”.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Blora, April 2019

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BLORA

Drs. SUGIYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620302 198103 1 003